

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, 2014, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung.
- E. Utrecht, 2020, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. Kesembilan, Ichtiar Baru, Jakarta
- Muhamin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Nazaruddin Lathif, dkk, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat, Bogor Tengah.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminitrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan HR, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

- S.Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siti Kotijah dan Ine Ventyrina, 2022, *Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, *Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Alfabeta, Bandung.
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Jurnal

Cristian Rumengan, 2021, “Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol 10, No.11.

Erni dan Febri Jaya, 2022, “ Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha”, *Wajah Hukum*, Vol 6, No. 2.

Helmi, 2021, “Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 28, No. 1.

Luqman Hakim. 2023, “Telaah Hukum Terhadap Perizinan Dalam Proses Investasi

Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja”ejournal.fisip.unjani.ac.id.

Moh. Rizky A. Jumadil ,dkk, 2023, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.7, No. 1.

Muhammad Rafif dan Zakki Adihidayati, 2023, “ Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman”, *Verstek* 11, No.4.

Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, 2021, “ Kewenangan Konkruen Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Kertha Senaya*, Vol 9, No. 2.

D. Internet

BPMI Setpres, 2021, “Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko”, <https://www.presidentri.go.id/foto/president-resmikan-peluncuran-online-single-submission-oss-berbasis-risiko/>, diakses pada 28 Maret 2024 Pukul 15:00 WIB.

DPMPTSP PADANG PANJANG, “ Sejarah Berdirinya DPMPTSP Kota Padang Panjang”, <https://dpmptsp.padangpanjang.go.id/sejarahdpmptsp>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 07.39 WIB.

OSS, 2021, “Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 2020”, <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, diakses pada tanggal 04 Mei 2024, pukul 15.32 WIB.

OSS,2021,“*Persyaratan Dasar*”<https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=kesesuaian-ruang&page=1>,diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 12.02 WIB.

OSS Indonesia, 2021, “*Apa itu OSS Berbasis Risiko*”,
<https://www.youtube.com/watch?v=DS9L19sV32Q>, diakses pada tanggal 04 Mei 2024,pukul 15.41 WIB.

Satoeasa, 2021, “*Tutorial Cara Daftar Izin Usaha di OSS RBA*”,
<https://www.youtube.com/watch?v=NIzO8swwFM4> , diakses pada tanggal 04 Mei 2024, pukul 11.22 WIB.

E. Wawancara

Dengan Bapak Syamsul Akmal, S.Pd, selaku *Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang*, pada hari Senin,29 Januari 2024, pukul 09.30 WIB.

Dengan Bapak Syamsul Akmal, S.Pd, selaku *Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang*, pada hari Kamis,21 Maret 2024, pukul 10.00 WIB.

Dengan Ibu Lusia Dona, S.Sos., selaku *Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang*, pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 10.30 WIB

Dengan Ibu Riya Maulina, ST., selaku *Analisis Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Padang Panjang*, pada hari Rabu, 27 Maret 2024,pukul 11.00 WIB.

